



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

TAHUN 2020

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan Negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB). Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, implemmentasi SAKIP sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi Pemerintah di lingkungannya setiap tahun dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD yang berjalan selama 1 tahun. LKIP ini berisi besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yang bisa dijadikan bahan evaluasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2020 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Bertolak dari kondisi faktual bahwa komunikasi dan informatika serta pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan sesuai pula dengan Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah :

“NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”,

dan pada Misi ke V yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut di atas, telah disusun Rencana Strategi berdasarkan kondisi obyektif daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan Tujuan dan Sasaran demi mewujudkan cita-cita sesuai Visi dan Misi yang diemban, mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, dan karena itu uraian-uraian selanjutnya dalam laporan ini merupakan gambaran untuk mempertanggungjawabkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyampaikan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tahun Anggaran 2020;
2. Deskripsi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;

3. Umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan ;
4. Sebagai penilaian terhadap Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, maka Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah:

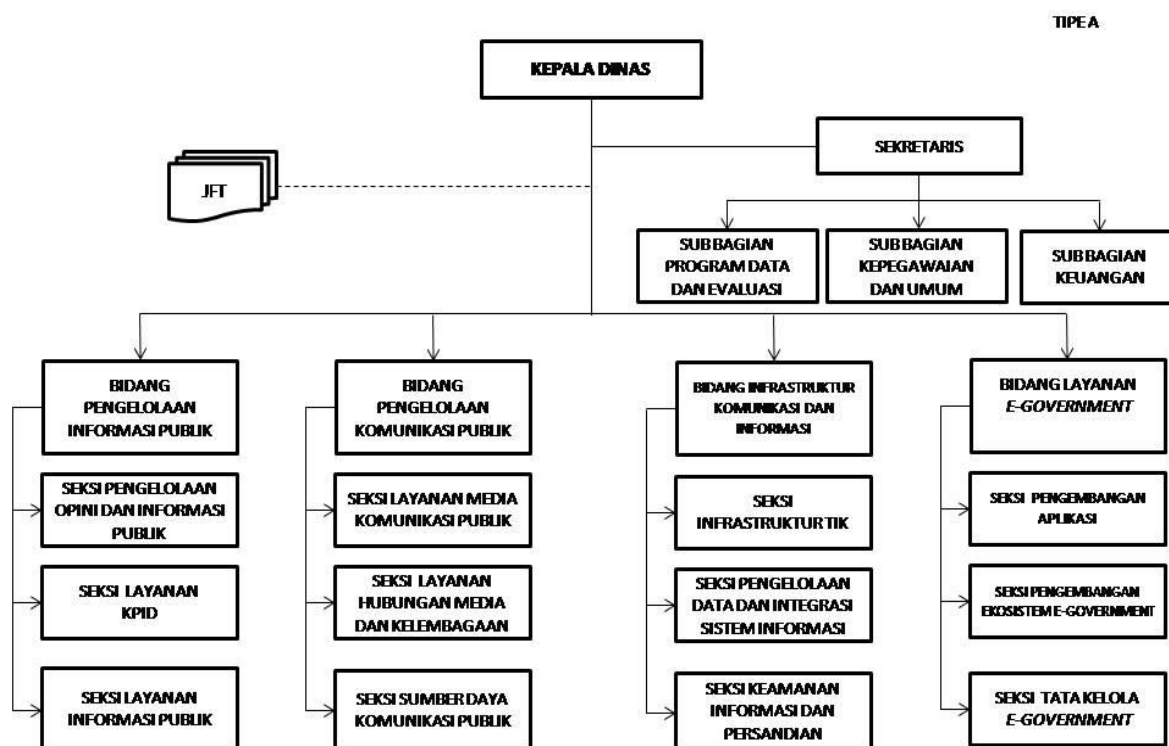
“Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 (lima belas) orang Kepala Sub Bagian/Seksi (Eselon IV). Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Selain Jabatan Struktural, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai Pejabat Fungsional (Pranata Humas dan Pustakawan) yang secara organisatoris berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2020 sebanyak 79 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel. 1
Status Kepegawaian.

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Presentase
1	PNS	79 orang	89,77 %
2	Tenaga Kontrak	9 orang	10,23 %
	Jumlah	8 orang	100 %

b. Komposisi Jabatan PNS

Tabel. 2
Jabatan PNS

No	Jabatan PNS	Jumlah	Presentase
1	Jabatan Struktural	21 orang	26,58 %
2	Jabatan Fungsional Tertentu	5 orang	6,33 %
3	Tenaga Fungsional Umum	53 orang	67,09 %
	Jumlah	79 orang	100 %

c. Komposisi Jabatan Struktural PNS

Tabel. 3
Jabatan Struktural PNS

No	Jabatan PNS	Jumlah	Presentase
1	Eselon II	1 orang	4,76 %
2	Eselon III	5 orang	23,81 %
3	Eselon IV	15 orang	71,43 %
	Jumlah	21 orang	100 %

d. Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan

Tabel. 4
PNS sesuai Pangkat dan Golongan

No	Golongan PNS	Jumlah	Presentase
1	Golongan IV	11 orang	13,92 %
2	Golongan III	54 orang	68,35 %
3	Golongan II	13 orang	16,46 %
4	Golongan I	1 orang	1,27 %
	Jumlah	79 orang	100 %

e. Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

Tabel. 5
PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan PNS	Jumlah	Presentase
1	Magister	8 orang	10,13 %
2	Sarjana	35 orang	44,30 %
3	D-III	1 orang	1,27 %
3	D-I	1 orang	1,27 %
4	SMU	30 orang	37,98 %
5	SLTP	3 orang	3,80 %
6	SD	1 orang	1,27 %
	Jumlah	79 orang	100 %

f. Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

Tabel. 6
Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan non PNS	Jumlah	Presentase
1	Sarjana	6 orang	6,67 %
2	SMU	3 orang	3,33 %
	Jumlah	9 orang	100 %

g. Komposisi Pegawai menurut Gender

Tabel. 7
PNS Menurut Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	45 orang	56,96 %
2	Wanita	34 orang	43,04 %
	Jumlah	79 orang	100 %

h. Jenis Pejabat Fungsional

Tabel. 8
Pejabat Fungsional

No	Nama Jabfung	Jumlah	Keterangan
1	Pranata Humas	4 orang	80 %
2	Pustakawan	1 orang	20 %
	Jumlah	5 orang	100 %

4. Keadaan sarana prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

Tabel. 9
Jumlah Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	4	Bidang	
2	Alat-alat berat	-		
3	Alat-alat angkutan	4	Unit	
4	Alat-alat bengkel dan alat ukur	-		
5	Alat kantor dan rumah tangga	-	Unit	
6	Alat studio dan komunikasi	1	Unit	
7	Alat-alat laboratorium	-		
8	Bangunan gedung	1	Gedung	
9	Jaringan	4	Unit	

Tabel. 10
Jumlah Perangkat Keras Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Server	5	Unit	Baik
2	PC/Komputer	42	Unit	Baik
3	Laptop	18	Unit	Baik
4	Router	49	Unit	Baik
5	Printer	22	Unit	Baik

Tabel. 11
Aset Tak Berwujud

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Notifikasi aplikasi sumaker	1	unit	Baik
2	Server anti virus	3	unit	Baik
3	Panel untuk server	1	unit	Baik
4	Anti virus	1	unit	Baik
5	Web CMS	1	unit	Baik
6	Aplikasi Video Editing	1	unit	Baik
7	Windows 2016 Profesional	1	unit	Baik
8	Aplikasi GIS	1	unit	Baik
9	Microsoft Office 2016	1	unit	Baik
10	Aplikasi E-Nadi NTT	1	unit	Baik
11	Aplikasi E-Absensi	1	unit	Baik

Tabel. 12
Jumlah Sarana Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	LCD Proyektor	4	unit	Baik
2	Kamera	1	unit	Baik
3	Handycam	1	unit	Baik
4	Kamera Shoting	2	unit	Baik

Demikian gambaran eksisting dukungan infrastruktur TIK, SDM dan prasarana pendukung lainnya sampai dengan kondisi tahun 2020.

D. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- ❖ **BAB I. PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sampai dengan Tahun 2020
 - D. Sistematika Penulisan LAKIP
- ❖ **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**
 - A. Rencana Stategi Organisasi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan dan Sasaran
 - B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
 - 1. Kebijakan
 - 2. Program
 - 3. Kegiatan
 - C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- ❖ **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**
 - A. Analisis Capaian Kinerja
 - 1. Metode Pengukuran Kinerja
 - 2. Capaian Kinerja (Uraian Berbagai Keberhasilan dan Kegagalan dalam Tahun 2020)
 - B. Akuntabilitas Keuangan (Alokasi dan Realisasinya)
 - C. Permasalahan yang dihadapi
 - D. Langkah - langkah Antisipatif yang diambil
- ❖ **BAB IV. PENUTUP**
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran – saran
- ❖ **Lampiran-lampiran :**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI

1. VISI :

Visi merupakan pedoman bagi upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi sebuah organisasi, karena itu Pemerintah Daerah Provinsi NTT menetapkan Visi sebagai berikut :

“NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

2. MISI :

Untuk menjabarkan visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan 5 Misi sebagai langkah konkretisasi terhadap Visi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam melaksanakan program dan kegiatan secara fokus menjabarkan Misi yang ke-5 yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas publik”**.

3. TUJUAN DAN SASARAN :

3.1 TUJUAN :

- 1) Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi publik dan menyediakan dukungan infrastruktur TIK mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3.2 SASARAN

- 1) Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
- 2) Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
- 3) Tersedianya kapasitas SDM SPBE.
- 4) Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif.
- 5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik.
- 6) Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web.
- 7) Meningkatnya penyebaran informasi dan keterbukaan informasi publik.
- 8) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika.
- 9) Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK.

Sasaran-sasaran tersebut diatas sudah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam Renstra Dinas Kominfo tahun 2018-2023.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Tabel. 13
RENCANA KINERJA TAHUN 2020 (RKT 2020)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		Outcome	Benefit	Impact
			KONDISI AWAL	2020			
1.	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT.	2,24 Index point	2,6 Index Point	Meningkatnya kualitas layanan SPBE dilingkup Pemerintah Prov.NTT.	Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi pada pengguna.	Terwujudnya reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	45	59,65	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik.	Masyarakat dapat mengakses ketersediaan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan.	Meningkatnya partisipasi publik dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
		Indeks Kematangan Keamanan Informasi	0	52,48	Meningkatnya indeks kematangan keamanan informasi.	Tersedianya regulasi, Terjaminnya keamanan penyelenggaraan SPBE dan meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM.	Terlindunginya aplikasi dari kejahatan cyber.
		Persentase cakupan internet di <i>Taurism Estate</i> .	30 %	100 %	Tersedianya jaringan internet di 7 (tujuh) destinasi pariwisata.	Masyarakat dapat mengakses jaringan internet.	Meningkatnya komunikasi dan promosi pariwisata berbasis digital.
		Persentase cakupan internet di Perangkat Daerah	15 %	50 %	Tersedianya jaringan internet di Perangkat Daerah.	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananan publik berbasis Elektronik.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

PROGRAM :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, dirumuskan program dan kegiatan yang berpedoman pada arah kebijakan umum strategi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut :

1. Program

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Kominfo Provinsi NTT melakukan 5 program yakni :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- e. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika.

2. Kegiatan

Dinas Kominfo Provinsi NTT pada Tahun 2020 melaksanakan sejumlah kegiatan baik kegiatan rutin maupun urusan wajib yakni :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Yang meliputi kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat – Menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 5) Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor.
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 10) Penyediaan Makanan Dan Minuman.

- 11) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
 - 12) Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras Dan Barang Dinas.
 - 13) Koordinasi, Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah.
 - 14) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
 - 15) Penyediaan Jasa Jaminan Sosial.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Yang meliputi kegiatan :
- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - 3) Pengadaan Meublaer.
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor.
 - 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- Yang meliputi kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Yang meliputi kegiatan :
- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Penyusunan Laporan-Laporan.
- e. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika
- Yang meliputi kegiatan :
- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 2) Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi.
 - 3) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 4) Pengembangan Layanan e-Government
 - 5) Manajemen Pelayanan Komunikasi dan Informatika

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, sebagai berikut :

Tabel. 14

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		Outcome	Benefit	Impact
			KONDISI AWAL	2020			
1.	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT.	2,24 Index point	2,6 Index Point	Meningkatnya kualitas layanan SPBE dilingkup Pemerintah Prov.NTT.	Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi pada pengguna.	Terwujudnya reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	45	59,65	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik.	Masyarakat dapat mengakses ketersediaan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan.	Meningkatnya partisipasi publik dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
		Indeks Kematangan Keamanan Informasi	0	52,48	Meningkatnya indeks kematangan keamanan informasi.	Tersedianya regulasi, Terjaminnya keamanan penyelenggaraan SPBE dan meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM.	Terlindunginya aplikasi dari kejahatan cyber.
		Persentase cakupan internet di <i>Taurism Estate</i> .	30 %	100 %	Tersedianya jaringan internet di 7 (tujuh) destinasi pariwisata.	Masyarakat dapat mengakses jaringan internet.	Meningkatnya komunikasi dan promosi pariwisata berbasis digital.
		Persentase cakupan internet di Perangkat Daerah	15 %	50 %	Tersedianya jaringan internet di Perangkat Daerah.	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananan publik berbasis Elektronik.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

A. PENDAPATAN

Retribusi Daerah

Rp. 73.00 0.000,-

B. APBD
PROGRAM

	ANGGARAN	
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	722.039.200,-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	672.328.900,-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	30.000.000,-
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	37.820.000,-
5 Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Rp.	2.689.852.901,-
JUMLAH	Rp.	4.152.041.001,-

C. APBN

1.	Rp.	-
2.	Rp.	-

D. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Pembangunan Zona Integritas di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (75 % dari sisa temuan dan 100% untuk temuan administrasi).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban suatu instansi untuk memberikan pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Oleh karena itu semua instansi Pemerintah tak terkecuali Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya harus memahami ruang lingkup akuntabilitasnya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah diatur tentang kewajiban Instansi Pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Sistem ini merupakan pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Mengukur Kinerja Tingkat Pencapaian Misi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, dilakukan dengan mempergunakan perhitungan Presentase, Rencana Tingkat Capaian dengan memperhatikan Karakteristik, Komponen Realisasi, dimana:

- a. apabila semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka rumus analisis yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau semakin rendah realisasi, menunjukkan semakin tingginya kinerja maka dalam perhitungan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dengan menggunakan model analisis capaian kinerja yang merujuk pada rumus diatas, maka indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai Sasaran-Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

Dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. Indeks ketersediaan layanan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT;
- b. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Indeks Kematangan Keamanan Informasi;
- d. Persentase cakupan internet di *Taurism Estate*;
- e. Persentase cakupan internet di Perangkat Daerah;

2. Capaian Kinerja

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja disimpulkan untuk masing-masing Indikator Kinerjanya maupun untuk capaian pada Tingkat Sasaran.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $75 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 75 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023, telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan sehingga berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja, maka sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

Tabel 15.
Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun dasar 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
1	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT.	Indeks	2,24 Index point	2,6 Index Point	3,26	100
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	45	59,65	59,65	100
3	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Nilai	0	52,48	52,48	100
4	Persentase cakupan internet di <i>Taurism Estate</i> .	%	30 %	100 %	100 %	100
5	Persentase cakupan internet di Perangkat Daerah	%	15 %	50 %	17,95 %	35,90
Rata – rata capaian						87,19

Analisis terhadap Indikator Kinerja diatas adalah sebagai berikut:

1. Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT.

Realisasi indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 dapat dilihat dari tercapainya indeks SPBE sebesar 3,26 poin dengan predikat "baik" berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian penerapan SPBE ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka terjadi peningkatan sebesar 1,02 poin atau sebesar 45,54 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a. Dukungan dan Komitmen pemerintah akan pentingnya peran SPBE dengan dilakukannya Evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan secara periodik dengan dibentuknya Tim Kerja sesuai SK Nomor:216/SK/HK/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tim Pelaksana Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Koordinasi antara Perangkat Daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE.
- c. Pengembangan aplikasi e-office yaitu aplikasi e-Absensi dan tata naskah dinas yang dikenal dengan aplikasi eNadiNTT pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan telah dimanfaatkan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.

Realisasi Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 adalah 59,65 % dengan kategori "kurang informatif". Jika dibandingkan dengan target maka realisasinya mencapai 100 %. Hal ini dipengaruhi oleh upaya meningkatkan pelayanan informasi dengan telah disediakannya layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- Website ppidutama.nttprov.go.id
- Helpdesk/layanan langsung/frontdesk
- Iklan layanan masyarakat
- Media elektronik televisi dan radio
- Tatap muka/sosialisasi
- Media sosial (*facebook, instagram, youtube*)

Salah satu media yang dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasi Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID utama dan PPID pembantu PPID melalui *website* PPID. *Website* ini dipilih sebagai media untuk menyampaikan data/informasi karena *website* merupakan salah satu media pelayanan publik yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Sejauh ini data/informasi yang dapat diakses pada *website* PPID Kominfo mencapai 18 jenis data. Data/informasi yang dipublikasi pun adalah data/informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, benar dan *up to date*.

Sepanjang tahun 2020 Informasi yang telah dipublikasikan adalah :

Tabel 16.
Tabel Publikasi Informasi

No	Uraian	JenisInformasi	Waktu Publikasi
1	Rencana Strategis Dinas Kominfo NTT 2018 - 2023	Berkala	24 April 2020
2	LKIP Dinas Kominfo Provinsi NTT Tahun 2019	Berkala	7 Juni 2020
3	Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kominfo NTT tahun 2019	Berkala	7 Juni 2020
4	Iklan layanan masyarakat Pencegahan dan Penanganan Covid 19	Setiap Saat	24 Juni 2020
5	Iklan Layanan Masyarakat "New Normal"	Setiap Saat	24 Juni 2020
6	Peraturan Gubernur Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE	Setiap Saat	27 Juni 2020
7	Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan E-Absensi bagi ASN LingkupPemerintah Provinsi NTT	Setiap Saat	27 Juni 2020
8	Rencana Induk (RENDUK) E-Government Provinsi NTT 2018 - 2023	SetiapSaat	12 Juli 2020
9	Standar Pelayanan Publik Dinas Kominfo Provinsi NTT	Berkala	15 Juli 2020
10	Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi Dan Informasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020	Berkala	24 Agustus 2020
11	Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019	Setiap Saat	25 Agustus 2020
12	Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan Provinsi NTT	Berkala	25 Agustus 2020
13	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika ProvinsiNTT	Berkala	25 Agustus 2020
14	Kalender kegiatan/kerja/tahun 2020	Berkala	25 Agustus 2020
15	Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2019	Berkala	26 Agustus 2020
16	Laporan Aset Dinas Kominfo Tahun 2019	Berkala	26 Agustus 2020
17	Empat ASN Diskominfo NTT Raih Penghargaan	Berkala	9 September 2020
18	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DinasKominfo NTT Tahun 2020	Berkala	4 Desember 2020

3. **Indeks Kematangan Keamanan Informasi**

Realisasi Indeks Kematangan Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2020 adalah sebesar 52,48. Jika dibandingkan dengan target maka realisasinya mencapai 100 %.

Hal ini disebabkan oleh adanya Kesadaran Pemerintah akan pentingnya penyelenggaraan pengamanan informasi agar keutuhan informasi dapat terjaga dari segala ancaman melalui persandian. Salah satu upaya yang dilakukan mendorong perkembangan teknologi dan informasi adalah dengan Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keamanan Informasi.

Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi dilakukan untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial.

4. **Persentase Cakupan Internet di Tourism Estate.**

Persentase cakupan internet di *Tourism Estate* lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 70 %. Hal ini disebabkan oleh langkah – langkah *affirmative* yang diambil dalam mendukung pembangunan menara stasiun pemancar dan penerima (BTS) untuk akses internet di Kabupaten/Kota berupa penyediaan lokasi dan perijinan sesuai alokasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Tabel 17.
Potret Persebaran Pembangunan dan Penyediaan Layanan Akses Internet dan Bts
di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	On Air (Titik)
1	Alor	12
2	Belu	44
3	Ende	37
4	Flores Timur	18
5	Kupang	8

6	Lembata	27
7	Malaka	17
8	Manggarai	4
9	Manggarai Barat	33
10	Manggarai Timur	26
11	Nagekeo	15
12	Ngada	12
13	Rote Ndao	9
14	Sabu Raijua	43
15	Sikka	22
16	Sumba Barat	5
17	Sumba Barat Daya	21
18	Sumba Tengah	16
19	Sumba Timur	62
20	Timor Tengah Selatan	8
21	Timor Tengah Utara	40
Jumlah		479

Penyediaan akses layanan internet sebanyak 852 titik yang tersebar di 21 Kabupaten yang telah dialokasikan pada lokasi :

1. Pendidikan
2. Destinasi pariwisata
3. Pemerintahan Desa
4. Pelayanan Kesehatan
5. UMKM

Sampai dengan akhir Tahun 2020 dibangun BTS USO dengan kualitas layanan 4G On Air sudah diresmikan pada 151 lokasi dengan rincian :

1. 133 tersebar di 20 Kabupaten 4G
2. 18 tersebar di destinasi super prioritas Manggarai Barat

5. **Persentase Cakupan Internet di Perangkat Daerah.**

Persentase penyediaan infrastruktur e-Goverment lingkup Pemerintah Provinsi pada tahun 2020 adalah sebanyak 17,95 % atau 7 dari 39 Perangkat Daerah. Jika dibandingkan dengan target indikator sasaran pada tahun 2020 memang tidak mencapai target yang diharapkan karena pada tahun 2020 untuk penyediaan internet dana yang dialokasikan hanya sebesar Rp. 500.000.000,- dari dana yang diusulkan sebesar Rp.2.000.000.000,-. Dengan alokasi dana tersebut hanya mampu menyediakan bandwidth internet sebesar 60 MBps dengan alokasi kuota bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. 18
 Persebaran Layanan Internet Lingkup Pemerintah Provinsi NTT

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja	Alokasi BW (Mbps)
1	Sekretariat DPRD	DPRD	10
2	Biro Umum	- Asisten 1	4
		- Asisten 2	4
		- Asisten 3	4
		- Ruang Rapat Gubernur	unlimited
		- Ruang Rapat Sekretaris Daerah	unlimited
		- Aula Fernandes	unlimited
3	Biro Hukum	Biro Hukum	4
4	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	4
5	Biro Ekonomi	Biro Ekonomi	4
6	Biro Organisasi	Biro Organisasi	4
7	Dinas Kominfo	- Dinas Kominfo	22
		- Server E-Nadi	unlimited
		- Server E-Absen	unlimited
		- Aula Kominfo	unlimited
Jumlah			60 Mbps

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan / Dana sebagai salah satu sub dalam kelompok kinerja sasaran, yakni : Indikator Kinerja Input, digunakan untuk membiayai kegiatan baik pendapatan, maupun belanja. dalam rangka Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020. Keseluruhan Anggaran / Dana berasal dari APBD Provinsi NTT, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2020, yang dapat dilaporkan alokasi dan realisasinya sebagai berikut :

Pendapatan

Tabel. 19
 Tabel Realisasi Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	73.000.000,-	15.750.000,-	21,58 %

Target tidak tercapai karena dari aspek objek penerimaan yaitu penyewaan aula, penyewaan mobil keliling dan sound system kurang mendapat peminat baik oleh Perangkat Daerah maupun oleh masyarakat karena berbagai kegiatan Perangkat Daerah dan masyarakat lebih banyak dilaksanakan di hotel selain itu banyak juga event – event dari masyarakat atau Perangkat Daerah yang terkena dampak covid-19.

Belanja

Tabel. 20
Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut :

NO	Kelompok Belanja	RENCANA / ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)		%
			Fisik	Keuangan	
1	Anggaran Belanja Tidak Langsung	8.594.793.000,-	100 %	7.915.592.072,-	92,10
2	Anggaran Belanja Langsung	4.152.041.001,-	100 %	3.867.867.253,-	93,16
	JUMLAH	12.746.834.001,-	100 %	11.783.495.325	92,44

Penyetoran kembali Rp. 963.374.676,-

Tabel. 21
Tabel Realisasi Belanja Langsung

Terhadap belanja langsung dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi		%	
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	722.039.200		672.097.419	100	93,08
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.900.000	2000	5.121.000	100	86,80
2	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	136.800.000	12	131.732.715	100	96,30
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	58.599.000	7	53.237.950	100	90,85
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	180.600.000	12	153.503.000	100	85,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.000.000	12	38.000.000	100	100,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.513.000	12	33.513.000	100	100,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.000.000	12	40.987.500	100	99,97
8	Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	12	64.697.320	100	86,26
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	6.000.000	12	5.548.000	100	92,47
10	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000	12	44.869.200	100	99,71
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14.000.000	5	13.333.300	100	95,24
12	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	15.000.000	12	15.000.000	100	100,00
13	Koordinasidan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	40.000.000	100	39.984.634	100	99,96

14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	25.000.000	12	24.975.000	100	99,90
15	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	7.627.200	12	7.594.800	100	99,58
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	672.328.900		645.027.445		95,94
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	205.861.000	10	205.729.435	100	99,94
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	171.968.400	30	171.955.910	100	99,99
3	Pengadaan Meubelair	55.000.000	5	36.750.400	100	66,82
4	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	90.000.000	12	83.332.700	100	92,59
5	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77.999.500	7	77.778.500	100	99,72
6	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	12	19.910.500	100	99,55
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	51.500.000	12	49570.000	100	96,25
	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000		30.000.000	100	100
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	30.000.000	100	30.000.000	100	100
03	Prog. Peningkatan Pengem. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	37.820.000		37.424.750	100	98,95
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	19	9.789.250	100	97,89
2.	Penyusunan Laporan-Laporan	27.820.000	100	27.635.500	100	90,81
15	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2.689.852.901		2.438.317.639	100	92,17
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	366.611.500	22	342.404.887	100	93,40
2	Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	262.155.500	100	244.328.600	100	93,20
3	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	913.857.000	3	879.270.500	100	96,22
5	Pengembangan Layanan E-Government	988.882.520	6	888.489.352	100	89,85
6	Manajemen Pelayanan Komunikasi dan Informatika	158.346.381	35	128.824.300	100	81,36

Dana yang digunakan untuk Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sesungguhnya sudah lebih fokus untuk dapat menyajikan seberapa besar tingkat capaian sasaran yang didasarkan pada tolok ukur kinerja. Meskipun demikian akuntabilitas keuangan belum dapat disajikan secara sempurna berdasarkan sasaran - sasaran strategis. Dengan perkataan lain aspek keuangan yang disajikan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) merupakan gambaran sebagai data keuangan yang dikelola sesuai rencana / alokasi dana / anggaran pada program kegiatan serta realisasi pelaksanaan sesuai realisasi program dan kegiatan.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran - sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam Tahun 2020 sebagai berikut:

1. SDM

Kualitas dan Kuantitas SDM merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian sasaran – sasaran strategis di lingkup Dinas Komunikasi. Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak memenuhi standar akan menghambat bahkan menjadi kendala dalam pencapaian sasaran –sasaran strategis yang telah diisyaratkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 – 2023.

Ketersediaan SDM yang belum memadai disebabkan minimnya pelatihan-pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi. Padahal pengembangan SDM harusnya menjadi salah satu prioritas dalam birokrasi saat ini apalagi di era *new normal* seperti sekarang ini dimana terdapat perubahan pola kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Karena itu ASN dituntut beradaptasi dengan pola kerja yang baru dengan meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas serta memprioritaskan penggunaan teknologi.

2. Dana

Alokasi dana yang sangat minim dan inkonsistensi anggaran dalam pembiayaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo, sehingga ada beberapa program/kegiatan yang diusulkan yang tidak diakomodir dalam DPA maupun DPPA TA.2020 bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sasaran kinerja yang direncanakan.

3. Infrastruktur

Berdasarkan kondisi saat ini masalah yang dihadapi oleh Dinas Kominfo adalah belum tersedianya infrastruktur jaringan yang berkualitas berupa cakupan SKPD yang ter-cover jaringan dan kecepatan internet. Bahkan dengan kapasitas internet yang sangat kecil masih terdapat penggunaan jaringan internet yang tidak sehat.

4. Dukungan perangkat daerah (PPID, e-NADI dan e-Absensi)

Kurangnya minat bahkan adanya keengganan dari Perangkat Daerah dalam memanfaatkan aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Dinas Kominfo seperti PPID, e-NAdi, dana-Absensi. Sehingga Perangkat Daerah belum menyediakan sarana dan prasarana

yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi – aplikasi yang ada seperti jaringan internet, komputer, dan mesin absensi yang sesuai standar. Selain itu masih sangat minimnya SDM yang berperan sebagai operator untuk mengoperasikan e-Absensi dan eNAdi. Perangkat Daerah juga belum menyediakan SOP terkait pemanfaatan aplikasi – aplikasi yang ada bahkan terdapat keengganan Perangkat Daerah untuk percepatan pelaksanaan eNAdi dan e-Absensi.

D. SOLUSI

Terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan internal maupun eksternal, maka solusinya adalah sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan kepada setiap ASN untuk menyalurkan ide dan gagasan, memberi penghargaan serta meningkatkan SDM melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan, *recruitment* dan perubahan sistem;
2. Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal mendapatkan dukungan dana APBN dan APBD;
3. Menyiapkan jaringan yang berkualitas dari segi cakupan SKPD yang dilayani dan besaran internet yang tersedia dengan mengoptimalkan dana yang ada.
4. Menyusun dan menetapkan berbagai regulasi terkait SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik dan membangun kemitraan dengan *stakeholder* terkait;

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari uraian - uraian pada bab - bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang dibuat sebagai kesimpulan dari keseluruhan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Provinsi NTT ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program kerja seperti yang tercantum dalam RPJMD Provinsi NTT tahun 2018 – 2023
2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi ;
3. Dari Pengukuran/Penilaian yang dilakukan terhadap sasaran strategis, tingkat capaian menunjukkan keberhasilan yang memuaskan dengan asumsi yang dipahami : **“semakin tinggi realisasi, menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik”**, artinya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2020 dengan capaian kinerja adalah **semakin baik**.
4. Terbatasnya alokasi dana/anggaran, sehingga berdampak pada beberapa program/kegiatan yang diusulkan yang tidak diakomodir dalam DPA maupun DPPA TA.2020 bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sasaran kinerja yang direncanakan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka diajukan beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Dana

Perlunya dukungan dana dalam membiayai program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo sehingga tidak ada lagi program dan kegiatan yang tidak diakomodir atau tidak memenuhi target sasaran kinerja yang direncanakan.

2. Infrastruktur

Jangkauan infrastruktur TIK yang belum optimal sangat mempengaruhi efektivitas SPBE dimana tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi. Untuk menyediakan jaringan internet yang berkualitas diperlukan dukungan dana yang juga memadai dari Pemerintah Daerah.

3. SDM

Untuk meningkatkan kualitas SDM setidaknya ada beberapa cara, antara lain melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier. Dalam era *new normal* ini peningkatan kualitas SDM dapat memanfaatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal juga peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi yang secara aktif mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government. Hal ini hanya bisa terwujud jika ada dukungan dana yang memadai.

4. Komitmen pimpinan perangkat daerah

Untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka kesadaran setiap pimpinan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, SDM, biaya termasuk regulasi.

5. Pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ditetapkan

Sampai saat ini SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal salah satunya karena masalah regulasi. Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan ataupun mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka perlu adanya kesadaran untuk menaati setiap regulasi yang telah dibuat dan pemberian sanksi apabila ada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. ABA MAULAKA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196302051986031031